



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 490 /406.001.3/2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 40);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
2. Lampiran II Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
3. Lampiran III Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo;
4. Lampiran IV Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5. Lampiran V Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup;

6. Lampiran VI Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran;
7. Lampiran VII Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Lampiran VIII Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Lampiran IX Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja;
10. Lampiran X Dinas Pertanian Dan Pangan;
11. Lampiran XI Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
12. Lampiran XII Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
13. Lampiran XIII Dinas Perhubungan;
14. Lampiran XIV Dinas Komunikasi Dan Informatika;
15. Lampiran XV Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan;
16. Lampiran XVI Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Lampiran XVII Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;
18. Lampiran XVIII Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
19. Lampiran XIX Dinas Perikanan;
20. Lampiran XX Sekretariat Daerah;
21. Lampiran XXI Sekretariat DPRD;
22. Lampiran XXII Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
23. Lampiran XXIII Badan Keuangan Daerah;
24. Lampiran XXIV Badan Kepegawaian Daerah;
25. Lampiran XXV Inspektorat;
26. Lampiran XXVI Kecamatan Trenggalek;
27. Lampiran XXVII Kecamatan Panggul;
28. Lampiran XXVIII Kecamatan Suruh;
29. Lampiran XXIX Kecamatan Durenan;
30. Lampiran XXX Kecamatan Pogalan;
31. Lampiran XXXI Kecamatan Watulimo;
32. Lampiran XXXII Kecamatan Tugu;
33. Lampiran XXXIII Kecamatan Dongko;
34. Lampiran XXXIV Kecamatan Kampak;
35. Lampiran XXXV Kecamatan Munjungan;
36. Lampiran XXXVI Kecamatan Pule;
37. Lampiran XXXVII Kecamatan Gandusari;
38. Lampiran XXXVIII Kecamatan Bendungan;

39. Lampiran XXXIX Kecamatan Karanganyar;
40. Lampiran XL Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
41. Lampiran XLI Dinas Peternakan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 15 Agustus 2022

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd.**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUNG YUDYANA  
NIP. 19680524 199703 1 001

**LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 188.45/490/406.001.3/2022  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek ini ada beberapa hal yang ingin diwujudkan melalui keberadaan Diskominfo, diantaranya meningkatkan eksistensi dari urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik serta urusan Persandian. Diharapkan, Diskominfo dapat menjadi suatu lembaga yang dapat diandalkan dalam penyediaan informasi yang berkualitas, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal melalui optimalisasi pelayanan berbasis multimedia (media cetak dan media elektronik), pelayanan transformasi digital, penyediaan data statistic sektoral yang handal dan pelayanan keamanan persandian.

**1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2022 secara efektif dan efisien

berdasarkan kebijakan daerah dalam menyikapi perubahan kondisi daerah yang sedang terjadi dan membutuhkan penanganan segera.

Sedangkan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada anggaran perubahan Tahun 2022;
2. Sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022;
3. Sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2022;
4. Mewujudkan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika agar sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; dan
5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, kompeten dan professional demi Pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik prima.

#### **1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN**

Dasar pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 disebabkan rencana kerja tahun 2022 disusun pada tahun lalu sehingga pada saat pelaksanaan terdapat kurang tepatnya dalam penentuan target, disamping itu juga penambahan atau pengurangan anggaran sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat skala prioritas untuk mensukseskan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2022.

#### **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENJA**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat/menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan serta sistematika dokumen Perubahan Renja.

##### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2022**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Dilengkapi dengan matriks format A (terlampir).

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja. (Dilengkapi dengan matrik form B (terlampir).

### **BAB IV PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Agar pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan Dinas yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 untuk menudukung visi dan misi Kabupaten Trenggalek maka dilaksanakan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan renja secara berkala.

Review hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dilakukan dengan mengevaluasi realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi capaian anggaran yang dikelola serta kendala/hambatan yang dihadapi.

Dalam pengelolaan APBD tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informasi mengelola anggaran sebesar Rp. 11.075.909.987. Capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Rp. 2.958.643.230 atau 26,71% terdiri dari 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, diuraikan pada realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.093.579.011 atau 18,90%, realisasi belanja program Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 353.477.000 atau 3,20%, realisasi belanja program Aplikasi Informatika sebesar Rp. 495.122.111 atau 4,47%, realisasi belanja program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp. 8.771.000 atau 0,08% dan realisasi belanja program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 7.694.108 atau 0,07%. Sedangkan dari sisi akuntabilitas capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan dalam hal capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II meliputi program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota realisasi kinerja dengan indikator program Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi kinerja sebesar 50%. Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi realisasi 74, 85% dan Persentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik sebesar 1.024.

Capaian realisasi kinerja pada program informasi dan komunikasi publik dengan indikator Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Daerah sebesar 45,93%. Capaian realisasi kinerja program aplikasi informatika dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo sebesar 65,63% dan capaian realisasi kinerja Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 76,67%. Sedangkan pada urusan statistik pada program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah capaian realisasi kinerja sebesar 37,50% dan urusan persandian dengan Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah, capaian realisasi sebesar 66,67%.

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

**Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	112,5 %	100%	50,00	50,00	162,50	162,50
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	186,37 %	100%	74,85	74,85	74,85	74,85
		Persentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik	100	813 %	211	211	211	1.024	1.024
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	9 dokumen	9 dokumen	8	4	50,00	13	144,44
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah yang disusun	9 Dokumen	9 dokumen	8	4	50,00	13	144
		Persentase Administrasi	100 %	98 %	100	68,75	82,15	82,15	82,15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan / di bayarkan	100 %	93,92% dokumen (26) (44 ASN)	14	9	64,29	35	35
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun ( buah/dokumen )	2 dokumen	2 dokumen	2	2	100,00	4	200
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	0 %	100	0	0,00	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat	20 ASN	0 ASN	20	0	0,00	0	0
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	257,31 %	100%	67,64	83,82	325	3,25
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2000 buah	2116 Buah	519	361	69,56	2.477	123,85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	1600 buah	2031 Buah	171	171	100,00	2.202	138
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang diadakan	400 buah	1330 Buah	500	267	53,40	1.597	399
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	25 kali	116 Kali	12	14	116,67	130	520

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	117,1 %	100%	25,00	25,00	25	25,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	15 buah	15 Buah	2	0	0,00	15	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	11 buah	14 Buah	10	3	30,00	17	155
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	99,95 %	100%	37,10	37,10	37,10	37,10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Daya Listrik Kantor yang dicukupi	39.531 kwh	38.390 KWH	39.531	29.093	73,60	67.483	171
		Jumlah kawat/faksimili/internet/TV berlangganan kantor yang dicukupi (Mbps)	200 Mbps	200 Mbps	0	0	0,00	0	0
		Jumlah Jasa Telepon Kantor yang dicukupi	2.000.000 Rp.	1.541.276 Rp	1.800.000	653.022	36,28	2.194.298	110
		Jumlah Koran yang dibayarkan	376 eksemplar	376 Eksemplar	93	350	376,34	726	193
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan dan Jaminan Asuransi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12	6	50,00	18	150
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	90,84 %	100%	68,75%	68,75	68,75%	68,75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di fasilitasi Jasa Pemeliharanya	24 buah	16 Buah	2	5	250,00	21	87,50
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Buah	3 Buah	3	0	0,00	3	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	80 buah	76 Buah	4	0	0,00	76	95,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	4 buah (gedung induk, tempat parkir, taman, RKPD)	6 Buah	4	1	25,00	7	175,00
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	94,10 %	100%	508,29	45,93	140,03	140,03
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase update informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	94,10 %	100%	508,29	45,93	140,03	140,03
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Update desiminasi informasi melalui penyajian konten di media IKP Pemerintah Daerah	22 kali	14 kali	0	0	0,00	14	64
		Jumlah Konten Informasi			30	269	896,67	269	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		yang diproduksi sebagai bahan desiminasi							
		Jumlah Peliputan penyelenggaraan program dan kinerja pemerintah daerah			300	0	0,00	0	0
		Jumlah pembuatan konten audio visual program dan kinerja pemerintah daerah			20	3	15,00	3	0
		Jumlah pembuatan serta Pemasangan Banner Penyelenggaraan Program dan Kinerja pemerintah daerah			15	0	0,00	0	0
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Update Desiminasi Informasi melalui Media Massa	2.014,00 Advetorial	2.385 Advetorial	2000	711	35,55	3.096	153,72
		Jumlah Desiminasi Informasi Program dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Komunikasi Publik yang dilaksanakan			12	0	0,00	0	0
		Jumlah Perpanjangan Ijin LPPL RPKT			2	0	0,00	0	0
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Tata Kelola Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik	6 Kali	7 kali	0	0	0,00	7	116,67
		Jumlah pengaduan / Aspirasi Masyarakat yang di tindaklanjuti			8	137	39,94	137	0
		Jumlah Rapat monev			2	0	0,00	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Sosialisasi Bimtek Pengelola Pengaduan dan PPID yang dilaksanakan			2	1	50,00	1	0
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan sebagai jejaring desiminasi informasi yang dikoordinasikan	5 Kali	2 kali	0	0	0,00	2	40,00
		Jumlah Kegiatan Kemitraan yang berpotensi mennjadi jejaring desiminasi informasi publik yang dikoordinasikan			1	2	200,00	2	0,00
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta penguatan kapasitas sumber daya manusia IKP	0	0	5	0	0,00	0	0,00
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarpras pendukung IKP yang diadakan	45 Jenis	53 jenis	52	2	3,85	55	122,22
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMASI</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	<b>100 %</b>	95,45 %	100%	65,63	65,63	65,63	65,63
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan	<b>100 %</b>	83,33 %	100%	37,84	76,67	76,67	76,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		terintegrasi							
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah ketersediaan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	95,45 %	100%	65,63	65,63	65,63	65,63
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12 kali	12 kali	283 (12 kali)	4	33,33	16	133,33
		Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12 Kali	12 Subdomain	283 (12 kali)	9	75,00	21	175,00
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diadakan	20 paket	18 paket	100	8	8,00	8,00	8,00
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	83,33 %	100%	37,84	76,67	76,67	76,67
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas SPBE yang Dilaksanakan	1 (8 kali) indeks	8 Kali	17	7	41,18	15	188
		Jumlah sosialisasi SPBE yang dilaksanakan	1 kali	4 kali	0	0	0,00	4	400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Kebijakan Teknis yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	1	2	200,00	4	200
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun	3 aplikasi	9 Aplikasi , 3 Kali	3	3	100,00	12	400
		Jumlah Sosialisasi Aplikasi yang dilaksanakan	2 kali	2 Kali	3	1	33,33	3	150
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan SDM ASN dan Masyarakat ( Online dan Offline ) yang Dilaksanakan	0 kali	0 orang	50	15	30,00	15	0
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<b>100 %</b>	100 %	100%	37,50	37,50	37,50	37,50
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota yang disusun	<b>4 dokumen</b>	4 dokumen %	4	2	37,50	37,50	37,50
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4 kali	2 kali	40	5	12,50	7	175

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4 dokumen	4 dokumen	4	2	50,00	6	150
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Pengintegrasian dan Interoperabilitas Data yang dilaksanakan	40 OPD	26 Jenis Data Sektoral	2	1	50,00	27	68
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									
	<b>PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	<b>100 %</b>	100 %	100%	66,67	66,67	66,67	66,67
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Penanganan Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang di Tangani	<b>1 Dokumen</b>	1 dokumen	1 dokumen	66,67	66,67	66,67	66,67
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kasus keamanan informasi dan persandian yang ditangani	40 OPD	3 Jenis , 40 OPD	3	2	66,67	5	13

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, tidak bisa lepas dari sumber daya anggaran yang digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan visi-misi Kabupaten Trenggalek.

Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Misi ke-3 : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan berbasis *Big Data* (Satu Data Besar)

Dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai visi misi Kabupaten Trenggalek berupa Tata kelola pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan gender berbasis pada Big Data yang mengutamakan sinergitas dan konektivitas melalui standarisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Integrasi dan sharing data antar OPD dapat meningkatkan adanya transparansi data sehingga mendukung terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga mendukung pembangunan infrastruktur digital sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur digital dalam era revolusi industri 4.0 yang merupakan transformasi komprehensif di sektor industri dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga diharapkan dengan pembangunan infrastruktur digital yang berwawasan lingkungan akan meningkatkan akses dan keahlian masyarakat dalam teknologi, informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur digital akan memberikan dampak pada sektor infrastruktur lain, diantaranya mendorong ekonomi digital, layanan pendidikan dan kesehatan digital, meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, implementasi teknologi baru dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Melalui rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 merupakan rencana kerja program, kegiatan dan sub serta pendanaan untuk mendukung visi misi Kabupaten Trenggalek. Namun dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan terdapat ketidaktepatan dalam penetapan target dan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan tepat sasaran maka perlu dilakukan perubahan baik penambahan, pengurangan maupun penghapusan kegiatan maupun sub kegiatan serta pendanaannya.

Perubahan anggaran tersebut diharapkan mampu merealisasikan target kinerja sesuai tema pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2022 yaitu: **“Pemulihan Ekonomi Berbasis Pariwisata Kolaboratif dan Berwawasan Lingkungan Ditunjang Pembangunan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Digital serta Pelayanan Publik yang Prima”**

Tema Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

**Pemulihan Ekonomi:**

Peningkatan kemampuan daerah dengan segala potensi yang dimiliki untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah dampak Pandemi COVID-19 serta pengentasan kemiskinan berbasis pariwisata kolaboratif dan berwawasan lingkungan.

**Pariwisata Kolaboratif Berwawasan Lingkungan**

Membangun ekonomi ekologi berbasis pariwisata yang berfokus pada desa wisata dengan memperhatikan aspek pembangunan dan ekosistem berkelanjutan.

**Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Digital serta Pelayanan Publik yang Prima:**

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan tahan bencana untuk menunjang pelayanan publik yang prima.

Rencana kerja dan pendanaan Diskominfo diawal tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan digunakan untuk belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset tetap lainnya dengan anggaran sebesar Rp.11.075.909.987,- (Sebelas Milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat prioritas terutama yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informasi berdasarkan tabel diatas mengalami kenaikan dari anggaran 11.075.909.987 menjadi 11.648.228.787, penambahan anggaran tersebut sebesar 572.318.800 atau 5,2%.

Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi untuk tahun 2022 dihapus dikarenakan kegiatan tersebut saat ini sering dilaksanakan secara virtual/online, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan yang bersifat prioritas. Sedangkan penambahan anggaran terdapat pada Program Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp.234.400.000 digunakan untuk penambahan belanja media dalam rangka update desiminasi informasi program pemerintah daerah. Sub kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan sebesar Rp.75.000.000 untuk penambahan belanja barang dan jasa dalam rangka persiapan pekan KIM Jatim direncanakan bulan Nopember 2022. Penambahan anggaran pada Program Aplikasi Informatika, kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp.68.318.800 untuk pembayaran belanja bandwidth bulan desember 2021 dan belanja pengadaan *smart branch* untuk kecamatan Panggul sebesar Rp.75.000.000 Kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.90.600.000 untuk pelaksanaan bimbingan teknis *Smart City* yang belum teranggarkan pada APBD induk. Selanjutnya penambahan anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.29.000.000 untuk tambahan honorarium tenaga penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika.

**TABEL 3.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**  
**TAHUN 2022**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			12.516.012.650	10.813.359.987	11.300.566.843				19.835.000.000	
2	16	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA</b>	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi		100 %	6.167.012.650	6.003.011.806	5.988.499.862			100 %	7.180.000.000
		Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	100 %							
		Persentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik			100 %	100 %							



**Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat	20 ASN	0 ASN	50.000.000	36.180.000	0			0 ASN	150.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	<b>439.982.000</b>	<b>327.965.319</b>	<b>339.758.170</b>			100 %	<b>530.000.000</b>
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	519 Buah	3485 Buah	170.000.000	145.000.000	170.098.170	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	3485 Buah	250.000.000
2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	126 Buah	307 Buah	40.000.000	30.900.000	2.900.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	307 Buah	55.000.000
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang diadakan	500 Buah	58546 Buah	29.982.000	21.982.000	21.982.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	58546 Buah	50.000.000
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	12 Kali	200 Kali	200.000.000	130.083.319	144.778.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Kali	175.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	<b>57.500.000</b>	<b>23.147.000</b>	<b>33.577.100</b>			100 %	<b>155.000.000</b>

**Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	16	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Buah	1 Unit	7.500.000	1.000.000	8.759.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	30.000.000
2	16	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10 Buah	5 Unit	50.000.000	22.147.000	24.818.100	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	125.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	<b>545.550.000</b>	<b>520.980.500</b>	<b>504.489.200</b>			100 %	<b>610.000.000</b>
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Daya Listrik Kantor yang dicukupi	39531 KWH	39531 KWH	91.200.000	88.200.000	94.020.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	39531 KWH	150.000.000
			Jumlah Jasa Telepon Kantor yang dicukupi			2000000 Rp	2000000 Rp								
			Jumlah Koran yang dibayarkan			1128 eksemplar	1128 eksemplar								
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan dan Jaminan Asuransi Kesehatan	1 Jenis 20 TPK	12 Dokumen	454.350.000	432.780.500	410.469.200	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	460.000.000

**Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	16	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100 %	<b>134.138.000</b>	<b>90.350.000</b>	<b>98.858.405</b>			100 %	<b>170.000.000</b>
2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di fasilitasi Jasa Pemeliharanya	2 Buah	24 Kali	30.000.000	20.850.000	20.850.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Kali	40.000.000
2	16	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Buah	9 Kali	5.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Kali	20.000.000
2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	4 Buah	40 Kali	40.000.000	48.500.000	48.500.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Kali	55.000.000
2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	4 Buah	4 Kali	59.138.000	20.000.000	28.508.405	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kali	55.000.000

**Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah		100 %	<b>1.784.000.000</b>	<b>1.545.202.200</b>	<b>1.854.602.200</b>			100 %	<b>5.875.000.000</b>
2	16	02	2,01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase update informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		100 %	<b>1.784.000.000</b>	<b>1.545.202.200</b>	<b>1.854.602.200</b>			100 %	<b>5.875.000.000</b>
2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Update desiminasi informasi melalui penyajian konten di media IKP Pemerintah Daerah	30 kali	10 kali	75.000.000	75.000.000	132.500.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 kali	500.000.000
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Update Desiminasi Informasi melalui Media Massa	12 Kali	1314 Kali	853.000.000	991.202.200	1.265.922.200	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1314 Kali	2.300.000.000
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan kemitraan sebagai jejaring desiminasi informasi yang	8 Kali	6 Kali	185.000.000	130.000.000	165.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Kali	375.000.000

**Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		dikoordinasikan													
2	16	02	2,01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan sebagai jejaring desiminasi informasi yang dikoordinasikan	1 7, 14, kali	6 Kali	71.000.000	61.000.000	136.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Kali	345.000.000
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta penguatan kapasitas sumber daya manusia IKP	5 kali	100 peserta	100.000.000	50.000.000	35.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 peserta	75.000.000
2	16	02	2,01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarpras pendukung IKP yang diadakan	52 jenis	2 Unit	500.000.000	238.000.000	120.180.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	2.280.000.000
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		100 %	4.565.000.000	3.265.145.981	3.457.464.781			100 %	6.780.000.000
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100 %	100 %						100 %	



**Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi SPBE yang Dilaksanakan	17 Kali	14 Kali	140.000.000	98.000.000	222.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Kali	330.000.000	
					Jumlah Kebijakan Teknis yang Disusun	1 Draf	1 Dokumen							1 Dokumen		
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun	3 Aplikasi , 3 Kali	3 Aplikasi , 3 Kali	150.000.000	118.000.000	118.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Aplikasi , 3 Kali	450.000.000	
					Jumlah Sosialisasi Aplikasi yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali							3 Kali		
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan SDM ASN dan Masyarakat ( Online dan Offline ) yang Dilaksanakan	50 Orang	5 Kali	50.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Kali	200.000.000	
<b>2</b>	<b>20</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>275.000.000</b>	<b>192.000.000</b>	<b>192.000.000</b>					<b>600.000.000</b>
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan		100 %	<b>275.000.000</b>	<b>192.000.000</b>	<b>192.000.000</b>				100 %	<b>600.000.000</b>

**Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		dan Evaluasi Pembangunan Daerah													
2	20	02	2,01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota yang disusun	100 %	4 Dokumen	<b>275.000.000</b>	<b>192.000.000</b>	<b>192.000.000</b>			4 Doku men	<b>600.000.000</b>
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	40 OPD	41 OPD	125.000.000	85.000.000	85.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	41 OPD	250.000.000
						Jumlah Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Dokumen						4 Doku men	
2	20	02	2,01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Pengintegrasian dan Interoperabilitas Data yang dilaksanakan	40 OPD	5 Dokumen, 41 OPD	150.000.000	107.000.000	107.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5 Doku men, 41 OPD	350.000.000
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>83.000.000</b>	<b>70.550.000</b>	<b>80.661.944</b>				<b>350.000.000</b>

**Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	21	02										
2	21	02	2,01									
2	21	02	2,01	03								
<b>TOTAL</b>												

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik sangat diprioritaskan.

Output Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.

Perubahan Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Trenggalek sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA  
NIP. 19680524199703 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 merupakan bagian integral dari program pembangunan pemerintah Kabupaten Trenggalek serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun berjalan, yang berpedoman kepada Renstra Tahun 2021-2026, untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang mendukung visi-misi Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.

Dengan disusunnya Renja, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Arah ini tentunya mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan.

Renstra yang telah di susun tersebut tidak akan berguna, jika tidak ada tindak lanjutnya. Komitmen dan motivasi yang timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berkenaan hal tersebut, maka semua unsur Pimpinan dan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek harus melaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini masih belum sempurna, dan berharap dalam Renja ini dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana, sehingga mampu mewujudkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.

Kami juga mohon maaf jika dalam penyusunan Renja Tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu atas kritik dan saran dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

Trenggalek, Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197106091992011002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
	2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	38
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
	3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V	PENUTUP	49

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD (Perangkat Daerah) sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek tahun 2023 memuat program/ kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang- Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembarannegara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang . Renja OPD juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan 2023 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan antara lain :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023; dan
- b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek selama tahun 2022.

##### **2.1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021**

Untuk memantapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian kinerja tahun 2021 diuraikan melalui Pendapat Asli Daerah yaitu Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 6.250.000 realisasi Rp. 6.250.000 atau 100% dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 15.104.121.677 realisasi Rp. 14.046.360.031 atau 93% terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2021

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3	4	5	6	7	8						
1	2	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			13.932.121.677				97,77%	97,77	1.348	13.621.417.377	0	0	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			13.932.121.677		13.621.417.377		97,77%	97,77	1.348	13.621.417.377	0	0	KOMINFO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi	100 %	5.637.981.107	186,37	5.608.021.138	186,37%	99,47%	99,47	186,37	5.608.021.138	0	0	KOMINFO
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	306.067.130	813,00	275.899.856	813,00%	90,14%	-	813,00	275.899.856	0	0	KOMINFO
	Peresentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	13.397.000	100,00	12.799.000	100,00%	95,54%	95,54	100,00	12.799.000	0	0	KOMINFO
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</i>	9 Dokumen	13.397.000	9	12.799.000	100,00%	95,54%	95,54	9	12.799.000	0	0	KOMINFO

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9	Dokumen	13.397.000	9	12.799.000	100,00%	95,54%	95,54	9	12.799.000	0	0	KOMINFO
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4.725.314.677</b>	<b>146,96</b>	<b>4.443.398.431</b>	<b>146,96%</b>	<b>94,03%</b>	<b>94,03</b>	<b>146,96</b>	<b>4.443.398.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	KOMINFO
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100	%	4.637.586.677	93,92	4.355.774.431	93,92%	93,92%	93,92	94	4.355.774.431	0	0	KOMINFO
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang di susun	2	dokumen	87.728.000	2	87.624.000	100,00%	99,88%	99,88	2	87.624.000	0	0	KOMINFO
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>361.736.430</b>	<b>257,31</b>	<b>339.969.700</b>	<b>257,31%</b>	<b>93,98%</b>	<b>93,98</b>	<b>257</b>	<b>339.969.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	KOMINFO
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2000	buah	183.996.430	2.116	179.783.050	105,81%	97,71%	97,71	2.116	179.783.050	0	0	KOMINFO
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	1600	unit	48.040.000	2.031	47.936.000	126,94%	99,78%	99,78	2.031	47.936.000	0	0	KOMINFO
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	400	buah	31.000.000	1.330	30.091.750	332,50%	97,07%	97,07	1.330	30.091.750	0	0	KOMINFO
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	25	kali	98.700.000	116	82.158.900	464,00%	83,24%	83,24	116	82.158.900	0	0	KOMINFO
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>112.235.000</b>	<b>117,1</b>	<b>104.972.091</b>	<b>117,13%</b>	<b>93,53%</b>	<b>93,53</b>	<b>117,13</b>	<b>104.972.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	KOMINFO
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	15	Unit	10.000.000	15	9.876.000	100,00%	98,76%						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	11	Unit	102.235.000	14	95.096.091	127,27%	93,02%	93,02	14	95.096.091	0	0	KOMINFO
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>550.930.000</b>	<b>154,84</b>	<b>535.954.151</b>	<b>154,84%</b>	<b>97,28%</b>	<b>97,28</b>	<b>155</b>	<b>535.954.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	KOMINFO

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi	39.531 kwh	124.550.000	38.390	111.690.648	97,11%	89,68%	89,68	38.390	111.690.648	0	0	KOMINFO
		Jumlah kawat/faksimili/internet/TV berlangganan kantor yang dicukupi	200 Mbps		200	0	100,00%		-	200	0	0	0	KOMINFO
		Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi	2.000.000		1.541.276	0	77,06%		-	1.541.276	0	0	0	KOMINFO
		Jumlah koran yang dibayarkan	376 eksemplar		376	0	100,00%		-	376	0	0	0	KOMINFO
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan yang menerima honorarium dan Jaminan Asuransi Kesehatan	12 Dokumen	426.380.000	12	424.263.503	100,00%	99,50%	99,50	12	424.263.503	0	0	KOMINFO
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>193.832.130</b>	<b>90,84</b>	<b>170.927.765</b>	<b>90,84%</b>	<b>88,18%</b>	<b>88,18</b>	<b>90,84</b>	<b>170.927.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KOMINFO</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang di Fasilitas Jasa Pemeliharanya	24 Unit	33.430.000	16	24.957.182	66,67%	74,66%	74,66	16	24.957.182	0	0	KOMINFO
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Buah	550.000	3	540.000	100,00%	98,18%	98,18	3	540.000	0	0	KOMINFO
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	80 Unit	73.824.130	76	62.773.278	95,00%	85,03%	85,03	76	62.773.278	0	0	KOMINFO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainya yang dipelihara	4 Unit (gedung induk, tempat parkir, taman, RKPD)	86.028.000	6	82.657.305	150,00%	96,08%	96,08	6	82.657.305	0	0	KOMINFO
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, Mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.263.084.270</b>	<b>94,10</b>	<b>2.091.652.428</b>	<b>94,10%</b>	<b>92,42%</b>	<b>92,42</b>	<b>94</b>	<b>2.091.652.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KOMINFO</b>

	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Update Informasi Publik Kebijakan, Program dan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	100	%	2.263.084.270	94,10	2.091.652.428	94,10%	92,42%	92,42	94	2.091.652.428	0	0	KOMINFO
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Update Desiminasi Informasi Melalui Penyajian Konten di Media IKP Pemerintah Daerah	22	Konten	130.000.012	14	101.364.000	63,64%	77,97%	77,97	14	101.364.000	0	0	KOMINFO
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Update Desiminasi Informasi Melalui Media Massa	2.014,00	Advetorial	955.935.000	2.385	929.815.194	118,42%	97,27%	97,27	2.385	929.815.194	0	0	KOMINFO
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Tata Kelola Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik	6	Kali	168.000.000	7	151.417.900	116,67%	90,13%	90,13	7	151.417.900	0	0	KOMINFO
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Sebagai Jejaring Desiminasi Informasi yang Dikoordinasikan	5	Kali	45.000.000	2	40.773.250	40,00%	90,61%	90,61	2	40.773.250	0	0	KOMINFO
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung IKP yang diadakan	45	Jenis	964.149.258	53	868.282.084	117,78%	90,06%	90,06	53	868.282.084	0	0	KOMINFO
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo</b>	100	%	5.246.589.730	71,50	5.244.051.009	71,50%	99,95%	99,95	71,50	5.244.051.009	0	0	KOMINFO
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	%	465.002.440	83,33	388.993.946	83,33%	-	-	83,33	388.993.946	0	0	KOMINFO
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelola Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah</b>	100	%	5.246.589.730	116,67	4.875.176.063	116,67%	92,92%	92,92	116,67	4.875.176.063	0	0	KOMINFO
		<b>Persentase Penyediaan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah</b>	100	%	-	1,33	0	1,33%	#DIV/0!	1,333333333	0	0	0	KOMINFO	

	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12 kali	72.600.000	12	58.496.148	100,00%	80,57%	80,57	12	58.496.148	0	0	KOMINFO
		Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12 Kali		16	0	133%							
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diadakan	20 paket	5.173.989.730	18	4.816.679.915	90,00%	93,09%	93,09	18	4.816.679.915	0	0	KOMINFO
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>465.002.440</b>	<b>83,33</b>	<b>397.663.946</b>	<b>83,33%</b>	<b>85,52%</b>	<b>85,52</b>	<b>83,33</b>	<b>397.663.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KOMINFO</b>
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas SPBE yang dilaksanakan	1 indeks	215.002.440	8	205.837.400	800,00%	95,74%	95,74	8	205.837.400	0	0	KOMINFO
		Jumlah sosialisasi SPBE yang dilaksanakan	1 kali		4	0	400,00%	-	-	4	0	0	0	KOMINFO
		Jumlah kebijakan teknis yang disusun	2 dokumen		2	0	100,00%	-	-	2	0	0	0	KOMINFO
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sosialisasi aplikasi yang dilaksanakan	2 kali	250.000.000	2	191.826.546	100,00%	76,73%	76,73	2	191.826.546	0	0	KOMINFO
		Jumlah aplikasi yang dibangun	3 aplikasi		9	0	300,00%	-	-	9	0	0	0	KOMINFO
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>877.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KOMINFO</b>
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>877.000.000</b>	<b>100</b>	<b>775.567.215</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,43%</b>	<b>88,43</b>	<b>100</b>	<b>775.567.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KOMINFO</b>
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang disusun</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>877.000.000</b>	<b>4</b>	<b>775.567.215</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,43%</b>	<b>88,43</b>	<b>4</b>	<b>775.567.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KOMINFO</b>

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4 kali	127.000.000	2	100.404.250	50,00%	79,06%	79,06	2	100.404.250	0	0	KOMINFO
		Jumlah Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4 dokumen		4	0	100,00%		-	4	0	0	0	KOMINFO
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Pengintegrasian dan Interoperabilitas Data yang dilaksanakan	40 OPD	750.000.000	26	675.162.965	65,00%	90,02%	90,02	26	675.162.965	0	0	KOMINFO
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>295.000.000</b>		<b>293.250.141</b>		<b>99,41%</b>	<b>99,41</b>	<b>0</b>	<b>293.250.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KOMINFO</b>
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>295.000.000</b>		<b>293.250.141</b>		<b>99,41%</b>	<b>99,41</b>	<b>0</b>	<b>293.250.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KOMINFO</b>
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	295.000.000	100	293.250.141	100,00%	99,41%	99,41	100	293.250.141	0	0	KOMINFO
	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan penanganan kasus keamanan informasi dan persandian yang disusun	1 Dokumen	295.000.000	1	293.250.141	100,00%	99,41%	99,41	1	293.250.141	0	0	KOMINFO
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kasus keamanan informasi dan persandian yang ditangani	40 OPD	295.000.000	3	293.250.141	7,50%	99,41%	99,41	3	293.250.141	0	0	KOMINFO

### 2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan **Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Renstra Diskominfo sampai dengan Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Diskominfo sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2  
Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD Tahun Berjalan yang dieval uasi (2022 )			Realisasi Kinerja Pada Triwulan  TW I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
		6	7	8	9	13=9+10+11+12	14=13/8x100%	15=7+13	16=15/6 x 100%											
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																				
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika																				
Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	88.397.000		12.799.000	100	50	0	50	0	0,5	0	50	12.799.000	50%	14%			Dinas Kominf o	
		%		%									%							

	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	34.297.201.357	%	5.319.322.282	100 117,15	530.391.022	117,2	530391022	1,17150 553	4,6731721 72	11 7,2 %	5.849.713.304	1,171505 5	0,170559 494	Dinas Kominf o
	Persentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik	100 %	1.264.257.130	%	266.023.856	100 0	0	0	0	0	0	0 %	266.023.856	0	0,210419 107	Dinas Kominf o
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	88.397.000	9 %	12.799.000	100 4		4	0	0,04	0	13 %	12.799.000	0,13	0,144789 982	Dinas Kominf o
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah yang disusun	8 Doku men	88.397.000	9 Doku men	12.799.000	8 4		4	0	0,5	0	13 Doku men	12.799.000	1,625	0,144789 982	Dinas Kominf o
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	28.949.527.927	%	4.443.398.431	100 18,75	530.391.022	18,75	530391022	0,1875	0,1063038 03	18, 75 %	4.973.789.453	0,1875	0,171809	Dinas Kominf o
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan / di bayarkan	14/1 00% Doku men	28.361.799.927	94% (26) Doku men	4.355.774.431	14 3	530.391.022	3	530391022	0,21428 571	0,1081770 78	## ## # Doku men	4.886.165.453		0,172279 808	Dinas Kominf o
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun	2 Buah / Doku men	587.728.000	2 Buah / Doku men	87.624.000	2 0		0	0	0	0	2 Buah / Doku men	87.624.000	1	0,149089 375	Dinas Kominf o
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	260.000.000	0 %	0	100 0		0	0	0	0	0 %	0	0	0	Dinas Kominf o

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat	122	ASN	260.000.000	0	ASN	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kominf o
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%	<b>2.301.646.430</b>		%	<b>339.969.700</b>	100	<b>78,44002</b>	<b>78,44</b>	<b>0</b>	<b>0,78440017</b>	<b>0</b>	<b>78,44</b>	<b>339.969.700</b>	<b>0,7844002</b>	<b>0,147707178</b>	Dinas Kominf o
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2500	Buah	1.033.996.430	<b>2116</b>	Buah	179.783.050	519	<b>555,551</b>	<b>555,6</b>	<b>0</b>	<b>1,07042582</b>	<b>0</b>	<b>2672</b>	<b>179.783.050</b>	<b>1,0686204</b>	<b>0,173872022</b>	Dinas Kominf o
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	1000	Buah	248.040.000	<b>2031</b>	Buah	47.936.000	126	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>1,35714286</b>	<b>0</b>	<b>2202</b>	<b>47.936.000</b>	<b>2,202</b>	<b>0,193259152</b>	Dinas Kominf o
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang diadakan	300	Buah	180.910.000	<b>1330</b>	Buah	30.091.750	500	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0,36</b>	<b>0</b>	<b>1510</b>	<b>30.091.750</b>	<b>5,0333333</b>	<b>0,166335471</b>	Dinas Kominf o
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	205	Kali	838.700.000	<b>116</b>	Kali	82.158.900	12	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,083333333</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>82.158.900</b>	<b>0,5707317</b>	<b>0,097959819</b>	Dinas Kominf o
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	%	399.735.000		%	95.096.091	100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.096.091</b>	<b>0</b>	<b>0,237897835</b>	Dinas Kominf o
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	44	Buah	47.500.000		Buah		2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dinas Kominf o
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	46	Buah	352.235.000	<b>14</b>	Buah	<b>95.096.091</b>	10	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>95.096.091</b>	<b>0,3043478</b>	<b>0,269979108</b>	Dinas Kominf o	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	2.786.027.000	%	535.954.151	100	19,96	19,96	0	0,19960535	0	19,96 %	535.954.151	0,1996054	0,192372203	Dinas Kominf o
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Daya Listrik Kantor yang dicukupi	39531 KWH	87.897.000	38.390 KWH	111.690.648	39.531	14.718	14718	0	0,3723154	0	53108 KWH	111.690.648	1,343452	1,270699205	Dinas Kominf o
	Jumlah kawat/faksimili/internet/TV berlangganan kantor yang dicukupi			200 Mbps		0										
	Jumlah Jasa Telepon Kantor yang dicukupi	2000000 Rp		2.000.000 Rp		1.800.000	352.411	#####	0	0,19578389		## ## # Rp	0	1,1762055		Dinas Kominf o
	Jumlah Koran yang dibayarkan	1.128 Eksemplar		376 Eksemplar		93	68	68	0	0,7311828		444 Eksemplar	0	0,393617		Dinas Kominf o
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan dan Jaminan Asuransi Kesehatan	72 Jenis 20 TPK	2.698.130.000	12 Jenis 20 TPK	424.263.503	1	2	2	0	2	0	14 Jenis 20 TPK	424.263.503	0,1944444	0,157243536	Dinas Kominf o
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di Pelihara	100 %	864.522.130	%	170.927.765	100	0	0	0	0	0	0 %	170.927.765	0	0,19771358	Dinas Kominf o
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di fasilitasi Pemeliharaanya	144 Buah	183.430.000	16 Buah	24.957.182	2	0	0	0	0	0	16 Buah	24.957.182	0,1111111	0,136058344	Dinas Kominf o

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	50 Buah	25.550.000	3 Buah	540.000	3 0	0	0	0	0	0	3 Buah	540.000	0,06	0,021135029	Dinas Kominf o	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Buah	273.824.130	76 Buah	62.773.278	4 0	0	0	0	0	0	76 Buah	62.773.278		0,229246699	Dinas Kominf o	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung , Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	4 Buah	381.718.000	6 Buah	82.657.305	4 0	0	0	0	0	0	6 Buah	82.657.305	1,5	0,216540234	Dinas Kominf o	
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	14.183.084.270	%	2.091.652.428	100 0,04	0,041	0	0,00040733	0	0,041	%	2.091.652.428	0,0004073	0,147475146	Dinas Kominf o	
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Update Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	14.183.084.270	%	2.091.652.428	100 0,04	0,041	0	0,00040733	0	0,041	%	2.091.652.428	0,0004073	0,147475146	Dinas Kominf o	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan	Jumlah Konten Informasi yang diproduksi	82 kali	755.000.012	14 kali	101.364.000	30 1	1	0	0,03333333	0	15 kali	101.364.000	0,1829268	0,134256952	Dinas Kominf o		

Media Komunikasi Publik	sebagai bahan desiminasi																	
	Jumlah Peliputan penyelenggaraan program dan kinerja pemerintah daerah		kali		kali		300	0		0	0	0		0	0		Dinas Kominf o	
	Jumlah pembuatan konten audio visual program dan kinerja pemerintah daerah		konten ( Swak elola )		konten ( Swak elola )		20	0		0	0	0		0	0		Dinas Kominf o	
	Jumlah pembuatan serta Pemasangan Banner Penyelenggaraan Program dan Kinerja pemerintah daerah		buah ( Baliho )		buah ( Baliho )		15	0		0	0	0		0	0		Dinas Kominf o	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik			kali		kali		6			0	0	0	0	0	0		Dinas Kominf o	
	Jumlah Update Desiminasi Informasi Melalui Media Massa		Advetorial		Advetorial		2000	0		0	0	0		0	0		Dinas Kominf o	
	Jumlah Desiminasi Informasi Program dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Komunikasi	8.756	Kali	6.347.935.000	2.385	Kali	929.815.194	12	0		0	0		2385	929.815.194	0,2723847	0,146475223	Dinas Kominf o

	Publik yang dilaksanakan																	
	Jumlah Perpanjangan Ijin LPPL RPKT	Dokumen		Dokumen		2	0		0	0	0		0	Dokumen	0		Dinas Kominf o	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan / Aspirasi Masyarakat yang di tindaklanjuti	54 Kali	1.323.000.000	Kali	151.417.900	8	66		66	0	8,25	0	66	Kali	151.417.900	1,222222 2	0,114450 416	Dinas Kominf o
	Jumlah Rapat monev	kali		kali		2	0		0	0	0		0	kali	0		Dinas Kominf o	
	Jumlah Sosialisasi Bimtek Pengelola Pengaduan dan PPID yang dilaksanakan	Kali		7 Kali		2	0		0	0	0		7	Kali	0		Dinas Kominf o	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan Kemitraan yang berpotensi menjjadi jejaring desiminasi informasi publik yang dikoordinasikan	39	430.000.000	7, 14, kali	40.773.250	2	7, 14, kali		0	0	0	0	2	7, 14, kali	40.773.250	0,051282 1	0,094821 512	Dinas Kominf o
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Komunikasi publik yang Mendapatkan Pembinaan	190 kali	660.000.000	kali		5	0		0	0	0	0	0	kali	0	0	0	Dinas Kominf o
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	jumlah barang/jasa pendukung IKP yang diadakan	185 jenis	4.667.149.258	53 jenis	868.282.084	52	0		0	0	0	0	53	jenis	868.282.084	0,286486 5	0,186041 208	Dinas Kominf o

Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota																	
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIK A</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Diskominfo	%	21.805.000.000	%	4.875.176.063	100	0,13		0,131	0	0,00130 548	0	0,1 31	4.875.176.063		0,223580 65	Dinas Kominf o
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	4.020.000.000	71,5 %	397.663.856	100	4,05		4,054	0	0,04054 054	0	75, 55	397.663.856		0,098921 357	Dinas Kominf o
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota</b>	Persentase Jumlah Ketersediaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	21.805.000.000	116,67 %	4.875.176.063	100	0,13		0,131	0	0,00130 548	0	11 6,8	4.875.176.063	1,168005 5	0,223580 65	Dinas Kominf o
Penatalaksa aan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggar aan Pemerintaha n Daerah	Jumlah Penatalaksanaa n Nama Domain dan Sub Domain	72 Cpan el	625.000.000	12 Cpane l	58.496.148	283			0	0	0	0	12 Cpane l	58.496.148	0,166666 7	0,093593 837	Dinas Kominf o

Kabupaten/Kota																		
	Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain yang dilaksanakan	72	Subdomain		Subdomain		283	0		0	0	0	0	0	0	Dinas Kominf o		
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diadakan	42	unit (42 unit jaringan)	21.180.000.000	18 %	4.816.679.915	100	1 paket		#####	0	0	4.816.679.915	0,227416427		Dinas Kominf o		
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	100	%	4.020.000.000	83,33 %	397.663.856	100	4,05		4,054	0	0,04054054	0	397.663.856	0,8738405	0,098921357	Dinas Kominf o	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas SPBE yang Dilaksanakan	86	Kali	1.720.000.000	8	Kali	205.837.400	17	0		0	0	0	205.837.400	0,0930233	0,119672907	Dinas Kominf o	
	Jumlah Kebijakan Teknis yang Disusun	12	Draf		2	Draf		1	1		1	0	1	0	0,25		Dinas Kominf o	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Jumlah Aplikasi yang dibangun	37	Aplikasi, 3 Kali	1.850.000.000	9	Aplikasi, 3 Kali	191.826.456	3	2		2	0	0,66666667	0	191.826.456	0,2972973	0,103689976	Dinas Kominf o

Pemerintahan Berbasis Elektronik																	
	Jumlah Sosialisasi Aplikasi yang dilaksanakan	38 Kali		2 Kali		3 0		0	0	0		2 Kali	0	0,0526316			Dinas Kominf o
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan SDM ASN dan Masyarakat ( Online dan Offline ) yang Dilaksanakan	50 Orang	450.000.000	0 Orang	0	50 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kominf o
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>10,87</b>		<b>10,87</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10,87</b>	<b>0</b>				Dinas Kominf o
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	1.775.000.000	100 %	775.567.215	100 10,87		10,87	0	0,10869565	0	110,9 %	775.567.215	1,1086957	0,436939276		Dinas Kominf o
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota yang disusun	%	1.775.000.000	4 %	775.567.215	100 10,87		10,87	0	0,10869565	0	14,87 %	775.567.215		0,436939276		Dinas Kominf o

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	74	OPD	825.000.000	2	OPD	100.404.250	40	5	5	0	0,125	0	7	100.404.250	0,0945946	0,121702121	Dinas Kominf o	
	Jumlah Pengelolaan Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan		Jenis		4	Jenis		4	0	0	0	0	0	4	0			Dinas Kominf o	
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Pengintegrasian dan Interoperabilitas Data yang dilaksanakan	41	41 OPD	950.000.000	26	Jenis Data Sektoral	675.162.965	2	0	0	0	0	0	26	675.162.965	0,6341463	0,710697858	Dinas Kominf o	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									<b>33,33</b>					<b>33,33</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		Dinas Kominf o
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI</b>	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100	%	715.000.000	10000	%	293.250.141	100	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>	0	0,33333333	0	133,3	293.250.141	1,33333333	0,410140057	Dinas Kominf o	
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Penanganan Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang di susun	100	%	715.000.000	1	%	293.250.141	100	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>	0	0,33333333	0	34,33	293.250.141	0,34333333	0,410140057	Dinas Kominf o	

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang di tangani	3-5	kasus (Jenis, 40 OPD)	715.000.000	3	Jenis, 40 OPD	293.250.141	3	1	1	0	0,33333333	0	4	Jenis, 40 OPD	293.250.141	8,952E-05	0,410140057	Dinas Kominfo
--	--	-----	-----------------------	-------------	---	---------------	-------------	---	---	---	---	------------	---	---	---------------	-------------	-----------	-------------	---------------



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta standar pelayanan yang menjadi urusannya. Sekretariat merupakan unit kerja penunjang keharmonisan hubungan antar unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional dengan indikator tujuan antara lain Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 70 (Baik) dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui indikator sasaran yang ditetapkan dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2023 antara lain:

1. Nilai (kategori nilai) SAKIP dengan target A (81)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 83

Sedangkan pada tujuan renstra 2021-2026 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima dengan indikator tujuan yang ditetapkan berupa Indeks SPBE pada tahun 2023 ditargetkan 3,0. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa sasaran Renstra antara lain:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik dengan indikator sasaran antara lain
  - a. Indeks keterbukaan informasi publik dengan target menuju informatif (80-96)
  - b. Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD dengan target 65%
  - c. Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah dengan target 720 informasi
  - d. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan dengan target 96%
  - e. Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi dengan target 5 kegiatan
2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika dengan indikator Persentase infrastruktur digital yang memadai target yang ingin dicapai 80% OPD tercover jaringan FO dan internet, 1 server dan storage sistem Informasi TIK
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan indikator Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi memadai target yang ingin dicapai berupa Data statistik sektorial dan 5 jenis data sektorial terintegrasi

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi dengan indikator Persentase layanan insiden TIK target yang ingin dicapai 100% layanan Keamanan Informasi dan Persandian.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	KETERANGAN
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih , efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Nilai (kategori nilai) SAKIP	80,17	-	
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	2,58	Peringkat indeks Baik
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	1. Indeks keterbukaan informasi publik	-	100%	
		2. Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	-	100%	
		3. Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	-		
		4. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	-		
		5. Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	-		
4.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai			
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi memadai			
6..	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase layanan insiden TIK	100%	100%	

=====

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD (Perangkat Daerah) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Trenggalek Tahun 2021- 2026, permasalahan dan isu – isu strategis yang dihadapi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

#### 2.3.1 Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika

- a. Belum optimalnya layanan informasi dan komunikasi publik berkualitas yang bisa diakses masyarakat secara cepat dan mudah.
  - Kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang tata kelola informasi dan komunikasi belum memenuhi standar kebutuhan pelayanan;
- b. Pusat data belum memenuhi standar TIER II;
- c. Belum optimalnya pembangunan dan integrasi aplikasi;
- d. Belum tercukupinya perangkat WAF sebagai penunjang dalam IPS (*Intrusion Preventio System*) atau IDS (*Intrusion Detection System*);
- e. Belum tersedianya rencana induk arsitektur SPBE, *Smart City* dan rencana pengembangan jaringan intra pemerintah;
- f. Belum optimalnya layanan pengaduan pemerintah daerah.

#### 2.3.2 Permasalahan pada urusan statistik

- a. Belum tersedianya data sektoral yang dapat dibagipakaikan dan diinteroperabilitaskan untuk pemenuhan data statistik daerah;
- b. Kurangnya infrastruktur statistik daerah untuk mewujudkan Trenggalek Satu Data;
- c. Masih kurangnya kompetensi SDM;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data statistik yang belum maksimal; dan
- e. Pengembangan sistem keamanan website belum optimal.

#### 2.3.3 Permasalahan pada urusan persandian

- a. Kualitas dan kuantitas SDM Persandian belum memadai;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang persandian.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Trenggalek Tahun 2021- 2026, isu – isu strategis yang dihadapi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terhubungnya jaringan tertutup intra pemerintah daerah;
- b. Integrasi Aplikasi layanan publik di Kab. Trenggalek;

- c. Meningkatnya keamanan Informasi pada Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah;
- d. Penyusunan regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- e. Pembangunan pusat data nasional oleh pemerintah;
- f. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- g. Pembangunan jaringan internal pemda;
- h. Pelaksanaan pemerintahan kolaboratif;
- i. GCIO (Government Chief Information Officer);
- j. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik;
- k. Satu data Indonesia;
- l. Pelayanan pengaduan masyarakat;
- m. Standar data, meta data, interoperabilitas data;
- n. Penerapan tanda tangan elektronik; dan
- o. Pembentukan CSIRT (telah dibentuk tahun 2021 kegiatan selanjutnya monitoring dan evaluasi Keamanan Informasi)

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Trenggalek. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 12.550.764.204 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai	Th. 2023			Keterangan
			Target Kinerja	Satuan	Rp.	
7	8	9	11		12	13
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>0</b>				<b>12.325.764.204</b>	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<i>Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (persen)</i>	<b>100%</b>		<b>5.676.687.204</b>	
		<b>Persentase nilai aset dalam kondisi baik (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>170.257.000</b>	
		<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)</i>	<b>100%</b>		<b>10.000.000</b>	
<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	27	dokumen	<b>10.000.000</b>	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	dokumen	10.000.000	RENJA, RENJA Perubahan, PK Induk, PK Perubahan, Penyusunan RENAKSI, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan, PPRG
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>		<b>4.791.726.704</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100	persen	4.704.102.704	rata-rata jumlah ASN perbulan yang menerima gaji
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	2	dokumen	87.624.000	Jumlah dokumen terkait Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>36.180.000</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	orang	36.180.000	Jumlah orang yang mengikuti diklat; Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi; Jumlah orang yang mengikuti Bimtek
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>319.000.000</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2500	buah	179.000.000	Peralatan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1000	buah	10.000.000	Mamin terkait fungsi Pelayanan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	300	unit	30.000.000	Barang Cetak dan Penggandaan/Fotocopy
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	kali	100.000.000	Laporan SPPD dan laporan pelaksanaan rapat
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan (peren)</b>	<b>100%</b>		<b>73.147.000</b>	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	7	unit	1.000.000	Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	7	unit	72.147.000	Pengadaan Komputer, Printer, laptop, scanner, dan sejenisnya
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>529.780.500</b>	
Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi (kwh)	39531	kwh	97.000.000	Laporan atas hasil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan pembayaran)
		<b>Jumlah jasadawat/faksimili/internet/TV berlangganan kantor yang dicukupi (Rupiah)</b>				
		Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi (Rupiah)	2.000.000	Rupiah		
		Jumlah koran yang dibayarkan	1.128	Eksemplar		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor bagi tenaga penunjang kegiatan dan jaminan asuransi kesehatan	12	dokumen	432.780.500	Pembayaran honorarium tenaga penunjang
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>97.110.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharannya (kali)	24	unit	20.850.000	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9	unit	1.000.000	Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	40	unit	48.500.000	Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	unit	26.760.000	Pemeliharaan sarpras pendukung gedung/ bangunan (misal : pagar, kanopi, paving, dll) gedung induk, tempat parkir, taman, rkpd
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>2.664.500.000</b>	
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Jumlah update informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>		<b>2.664.500.000</b>	

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah update desiminasi informasi melalui penyajian konten di media IKP pemerintah daerah	10	kali	175.000.000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah update desiminasi informasi melalui media massa	1.314	kali	1.917.900.000	
Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Tata Kelola Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik	6	kali	150.000.000	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah pembinaan dan pengembangan kemitraan sebagai jejaring desiminasi informasi yang dikoordinasikan	6	kali	125.000.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta penguatan kapasitas sumber daya manusia IKP	30	orang	50.000.000	
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarpras pendukung IKP yang diadakan	20	unit	246.600.000	
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo</b>	<b>100%</b>		<b>3.804.320.000</b>	

		<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>100%</b>		<b>369.820.000</b>	
<b><i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>		<b><i>Persentase jumlah ketersediaan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah fasilitas</i></b>	<b>100%</b>		<b>3.804.320.000</b>	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12	dokumen	54.500.000	
		Jumlah pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12	kali		
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7	unit	3.380.000.000	
<b><i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>		<b><i>Persentase jumlah terselenggaranya e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>100%</b>		<b>369.820.000</b>	

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi SPBE yang dilaksanakan	17	kali	211.820.000	
		Jumlah sosialisasi SPBE yang dilaksanakan	0			
		Jumlah kebijakan teknis yang disusun	2	dokumen		
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun	3	unit	118.000.000	
		Jumlah sosialisasi aplikasi yang dilaksanakan	3	kali		
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan SDM ASN dan Masyarakat (online dan Offline) yang dilaksanakan	10	kali	40.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					<b>155.000.000</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<b>100%</b>		<b>155.000.000</b>	

<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah dokumen data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	<b>4</b>	<b>dokumen</b>	<b>155.000.000</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4	dokumen	85.000.000	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	14	kali		
Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Pengintegrasian dan Interoperabilitas Data yang dilaksanakan	5	dokumen	70.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>100%</b>		<b>70.000.000</b>	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>	<b>100%</b>		<b>70.000.000</b>	
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Laporan Penanganan Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang ditangani</b>	<b>1</b>	<b>dokumen</b>	<b>70.000.000</b>	

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kasus keamanan informasi dan persandian yang ditangani	3-5	kasus	70.000.000	
--	--	---	-----	-------	------------	--

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Trenggalek. Pada Musrenbang tahun 2022 diperoleh data usulan dari desa Nglebo Kecamatan Suruh dan desa Watuagung Kecamatan Dongko yaitu Penguatan Kapasitas Sumber Daya Informasi dan Komunikasi Publik dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

Urut	Pengusul	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Bidang Pembangunan	Keterangan
12	Pemerintah Desa Nglebo	Komunikasi dan Informatika	#MPP Penguatan Kapasitas Sumber Daya Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Sistem Teknologi informasi Desa	Desa Nglebo, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rekomendasi : Usulan diterima dan diteruskan ke tahap selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BIDANG SOSBUDPEM/PPM	
	PEMERINTAH DESA WATUAGUNG	Komunikasi dan Informatika	MPP Penguatan Kapasitas Sumber Daya Informasi dan Komunikasi Publik	Kurangnya Daya Informasi terkait internet dan di butuhkan di masing - masing lingkungan untuk penunjang perkembangan zaman yang serba internet	RT 013 RW 003 Dusun Ngleban, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rekomendasi : Usulan diterima dan diteruskan ke tahap selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BIDANG SOSBUDPEM/PPM	













Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dirumuskan dengan mempertimbangkan juga pada isu-isu strategis RPJPD periode ke 5 (lima) dan isu-isu faktual terkini. Adapun tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 adalah :

**“MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI RAKYAT MELALUI SDM KREATIF DAN EKOSISTEM YANG TERJAGA”**

Tema Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

**Mempercepat pemulihan ekonomi rakyat :**

Peningkatan kemampuan daerah dengan segala potensi yang dimiliki untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi covid 19 serta pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata dan industri kreatif.

**SDM Kreatif :**

Peningkatan kualitas SDM unggul yang kreatif dan menumbuhkan jiwa wirausaha.

**Ekosistem Terjaga :**

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan tahan bencana untuk menunjang pelayanan

publik.

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 didukung dan dilaksanakan melalui 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Mendorong Investasi dan Akselerasi Ekonomi Berbasis Industri Kreatif dan Pariwisata untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan;
2. Menciptakan SDM Unggul, Penuh Kreatifitas Yang Siap Kerja dan Berwirausaha; dan
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Berwawasan Lingkungan untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sebagaimana tema pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2021 dapat dijabarkan dan diuraikan sebagai berikut:

**1. Mendorong Investasi dan Akselerasi Ekonomi Berbasis Industri Kreatif dan Pariwisata untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan:**

- Mempercepat pemulihan ekonomi utamanya sektor-sektor yang terdampak COVID-19
- Peningkatan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
- Penumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang berpihak pada rakyat kecil dan termarjinalkan serta dilakukan secara terus menerus dengan memberdayakan semua potensi lokal yang ada demi terwujudnya kemandirian masyarakat;
- Upaya penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama dan melibatkan semua pihak serta optimalisasi akselerasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya;
- Peningkatan kualitas BUMDes/ BUMDes Bersama; dan
- Peningkatan akselerasi ekonomi melalui dukungan implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertosusila, BTS, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

**2. Menciptakan SDM Unggul, Penuh Kreatifitas Yang Siap Kerja dan Berwirausaha :**

- Peningkatan pemerataan pelayanan dasar yang berkualitas demi mewujudkan SDM Unggul;
- Pembangunan manusia yang berlandaskan pada 3 (tiga) pilar pembangunan : Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter; dan

- Penumbuhan wirasusaha baru, diutamakan untuk kelompok usia produktif, perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya serta masyarakat terkena dampak COVID-19

**3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Berwawasan Lingkungan untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas:**

- Pembangunan infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi :
  - a) Aspek Tingkat Pemerintahan dan kewenangan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa);
  - b) Aspek Pendanaan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, dan sumber pembiayaan alternatif lainnya);
  - c) Aspek Sektoral (Fisik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan);
  - d) Aspek Spasial (sistem pengembangan wilayah dan kawasan rawan bencana);
  - e) Aspek Hukum (Status Lahan, Kesesuaian Tata Ruang dan Legalitas Pengelolaan).
- Pembangunan Infrastruktur Digital yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pemantapan *e-government*;
- Pemantapan implementasi dan integrasi *e-planning*, *e-budgeting*, *e-SAKIP* dan *dashboard perencanaan*;
- Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat serta berorientasi pada :
  - a) Kepuasan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
  - b) Pemantapan pelayanan dasar; dan
  - c) Penguatan sumberdaya aparatur.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.











*1*



**TABEL.2.1.2**

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi terdiri dari:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
- c) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
  - 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
  - 2) Seksi Pengelolaan Informasi;
  - 3) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- d) Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
  - 1) Seksi Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - 2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - 3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- e) Bidang E-Government dan Statistik, membawahi:
  - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
  - 2) Seksi Penyelenggaraan E-Government;
  - 3) Seksi Data dan Statistik;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) UPT Dinas.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

#### **3.1.1 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019-2024**

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus pada membangun infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan koneksifitas broadband di seluruh wilayah Indonesia, mendorong transformasi digital pada sector ekonomi dan pemerintahan yang didukung oleh sumberdaya manusia digital, memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik, mempersiapkan masyarakat secara sosial dan budaya untuk memasuki dunia digital. Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2019-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan; dan
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian; dan
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector dibidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran; dan
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

### **3.1.2 Renstra BSSN RI**

#### **Visi dan MISI BSSN**

##### **Visi**

Menjadi institusi terpercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

##### **Misi**

1. Menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif

3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi
4. Membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan system identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi
5. Membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warganegara Indonesia
6. Menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

#### **Tujuan Renstra BSSN RI**

1. Tercapainya fondasi struktur, system dan budaya organisasi BSSN yang kuat.
2. Tersusunnya kebijakan, system dan prosedur berstandar global dalam bidang keamanan siber dan sandi di Indonesia.
3. Tersedianya system manajemen talenta untuk menarik, memelihara dan meretensi SDM siber dan sandi terbaik.
4. Tercapainya kinerja pencegahan, deteksi, mitigasi, dan penanggulangan ancaman keamanan siber dan sandi.
5. Terselenggaranya kerjasama-kerjasama strategis dengan seluruh pihak untuk membangun keamanan siber dan sandi di Indonesia.
6. Terbentuknya kesadaran, perilaku dan budaya keamanan siber yang baik pada setiap warganegara Indonesia.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan Tema” **Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim melalui SDM Inovatif, Kolaboratif Serta Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan**”

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 didukung dan dilaksanakan melalui 2 (dua) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif, Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan;

## 2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital dan Berwawasan Lingkungan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Trenggalek sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan membantu Bupati Trenggalek dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangannya, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kebijakan dibidang teknologi digital. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Trenggalek dalam menjalankan visi dan misi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021 – 2026 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2021– 2026.

Adapun **Visi** Bupati-Wakil Bupati Trenggalek H. MOCHAMAD NUR ARIFIN dan SYAH MUHAMMAD NATA NEGARA yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development)”***

Sedangkan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
- 2) Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar)
- 4) Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan

### 3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 bertujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih , efektif, efisien, produktif dan profesional; dan
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima.

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
3. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika;
4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek menetapkan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Memperhatikan Tugas dan fungsi pada masing-masing Bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Trenggalek oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

- A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi:
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
    - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
    - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
    - 1) Pengadaan Mebel; dan
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
    - 1) Penyediaan Jasa Listrik, internet, telpon, koran; dan
    - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - 2) Pemeliharaan Mebel;
    - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
    - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, kegiatan:  
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari:
- 1) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
  - 2) Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - 3) Pelayanan Informasi Publik;
  - 4) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;

- 5) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
- 6) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Aplikasi Informatika, meliputi kegiatan

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari:
  - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain; dan
  - 2) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari:
  - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
  - 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan teridiri dari:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral; dan
- 2) Pengembangan Infrastruktur.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

























## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, *process*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan **“Meningkatkan SDNM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan”**. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran sebesar Rp. 12.550.764.204,- diampu oleh 3 (tiga) urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Anggaran tersebut dijabarkan pada 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga terdapat pendapatan asli daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari pendapatan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)/Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD), tahun 2023 sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023**

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai	Th. 2023			Keterangan
			Target Kinerja	Satuan	Rp.	
7	8	9	11		12	13
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>0</b>				<b>12.325.764.204</b>	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<i>Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (persen)</i>	<b>100%</b>		<b>5.676.687.204</b>	
		<b>Persentase nilai aset dalam kondisi baik (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>170.257.000</b>	
		<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)</i>	<b>100%</b>		<b>10.000.000</b>	
<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	27	dokumen	<b>10.000.000</b>	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	dokumen	10.000.000	RENJA, RENJA Perubahan, PK Induk, PK Perubahan, Penyusunan RENAKSI, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan, PPRG
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>		<b>4.791.726.704</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100	persen	4.704.102.704	rata-rata jumlah ASN perbulan yang menerima gaji
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	2	dokumen	87.624.000	Jumlah dokumen terkait Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>36.180.000</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	orang	36.180.000	Jumlah orang yang mengikuti diklat; Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi; Jumlah orang yang mengikuti Bimtek
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>319.000.000</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2500	buah	179.000.000	Peralatan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1000	buah	10.000.000	Mamin terkait fungsi Pelayanan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	300	unit	30.000.000	Barang Cetak dan Penggandaan/Fotocopy
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	kali	100.000.000	Laporan SPPD dan laporan pelaksanaan rapat
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan (peren)</b>	<b>100%</b>		<b>73.147.000</b>	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	7	unit	1.000.000	Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	7	unit	72.147.000	Pengadaan Komputer, Printer, laptop, scanner, dan sejenisnya
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>529.780.500</b>	
Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi (kwh)	39531	kwh	97.000.000	Laporan atas hasil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan pembayaran)
		<b>Jumlah jasadawat/faksimili/internet/TV berlangganan kantor yang dicukupi (Rupiah)</b>				
		Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi (Rupiah)	2.000.000	Rupiah		
		Jumlah koran yang dibayarkan	1.128	Eksemplar		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor bagi tenaga penunjang kegiatan dan jaminan asuransi kesehatan	12	dokumen	432.780.500	Pembayaran honorarium tenaga penunjang
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (persen)</b>	<b>100%</b>		<b>97.110.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya (kali)	24	unit	20.850.000	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9	unit	1.000.000	Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	40	unit	48.500.000	Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	unit	26.760.000	Pemeliharaan sarpras pendukung gedung/ bangunan (misal : pagar, kanopi, paving, dll) gedung induk, tempat parkir, taman, rkpd
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>2.664.500.000</b>	
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Jumlah update informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>		<b>2.664.500.000</b>	

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah update desiminasi informasi melalui penyajian konten di media IKP pemerintah daerah	10	kali	175.000.000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah update desiminasi informasi melalui media massa	1.314	kali	1.917.900.000	
Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Tata Kelola Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik	6	kali	150.000.000	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah pembinaan dan pengembangan kemitraan sebagai jejaring desiminasi informasi yang dikoordinasikan	6	kali	125.000.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta penguatan kapasitas sumber daya manusia IKP	30	orang	50.000.000	
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarpras pendukung IKP yang diadakan	20	unit	246.600.000	
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo</b>	<b>100%</b>		<b>3.804.320.000</b>	

		<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>100%</b>		<b>369.820.000</b>	
<b><i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>		<b><i>Persentase jumlah ketersediaan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah fasilitas</i></b>	<b>100%</b>		<b>3.804.320.000</b>	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12	dokumen	54.500.000	
		Jumlah pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12	kali		
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7	unit	3.380.000.000	
<b><i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>		<b><i>Persentase jumlah terselenggaranya e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>100%</b>		<b>369.820.000</b>	

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi SPBE yang dilaksanakan	17	kali	211.820.000	
		Jumlah sosialisasi SPBE yang dilaksanakan	0			
		Jumlah kebijakan teknis yang disusun	2	dokumen		
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun	3	unit	118.000.000	
		Jumlah sosialisasi aplikasi yang dilaksanakan	3	kali		
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan SDM ASN dan Masyarakat (online dan Offline) yang dilaksanakan	10	kali	40.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					<b>155.000.000</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<b>100%</b>		<b>155.000.000</b>	

<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah dokumen data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	<b>4</b>	<b>dokumen</b>	<b>155.000.000</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4	dokumen	85.000.000	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	14	kali		
Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Pengintegrasian dan Interoperabilitas Data yang dilaksanakan	5	dokumen	70.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>100%</b>		<b>70.000.000</b>	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>	<b>100%</b>		<b>70.000.000</b>	
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Laporan Penanganan Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang ditangani</b>	<b>1</b>	<b>dokumen</b>	<b>70.000.000</b>	

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kasus keamanan informasi dan persandian yang ditangani	3-5	kasus	70.000.000	
--	--	---	-----	-------	------------	--



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Renja Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Trenggalek disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 yaitu **“Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui SDM Inovatif, Kolaboratif Serta Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”** didukung beberapa prioritas pembangunan daerah.

Prioritas ke-1 yaitu **“Meningkatkan SDNM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan”** serta tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 harus selaras dan konsisten dengan tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 yaitu:

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih , efektif, efisien, produktif dan profesional, dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, target kinerja tujuan pada tahun 2023 ditetapkan 70 Nilai RB.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima, dengan indikator Indeks SPBE, target kinerja tujuan yang ditetapkan pada tahun 2023 ditetapkan 3,0 Indeks SPBE.

Sedangkan sasaran Renstra Diskominfo tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan indikator
  - a. Nilai (kategori nilai) SAKIP, target kinerja sasaran yang ingin dicapai 2023 ditetapkan A (81);
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target kinerja sasaran yang ingin dicapai 2023 ditetapkan 83.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, dengan indikator meliputi:
  - a. Indeks keterbukaan informasi publik, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan menuju informatif (80-96);
  - b. Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 65%;
  - c. Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 720 informasi;
  - d. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 96%;

- e. Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 5 kegiatan.
3. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika, dengan indikator yaitu Persentase infrastruktur digital yang memadai, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 80% OPD tercover jaringan FO dan internet, 1 server dan storage sistem Informasi TIK
4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator yaitu Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan Data statistik sektoral dan 5 jenis data sektoral terintegrasi; dan
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi dengan indikator yaitu Persentase layanan insiden TIK, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 100% layanan Keamanan Informasi dan Persandian.

Diskominfo melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp. 12.550.764.204,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus EmpatRupiah) yang terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga penghasil pendapatan asli daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari pendapatan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)/Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD), tahun 2023 sebesar Rp. 6.250.000.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2023, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program, kegiatan sub kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Diskominfo Kabupaten Trenggalek haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat tahunan.

Trenggalek, Mei 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 197106091992011002